

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset tetap merupakan salah satu akun dalam laporan keuangan yang memiliki porsi yang sangat besar dibanding total asetnya. Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap dapat bersifat permanen karena memiliki masa manfaat ekonomis yang lebih dari satu tahun dan tidak dijual kembali.

Aset tetap mempunyai peranan yang penting dan signifikan dalam menunjang tujuan suatu entitas. Hal ini didasari oleh besarnya manfaat yang diperoleh terkait aset tetap tersebut, contohnya bangunan dan kendaraan yang secara tidak langsung dapat menunjang kegiatan operasional entitas. Kemudian daripada itu, selain menunjang kegiatan operasional, aset tetap nyatanya dapat menjaga nilai aset agar tidak menurun secara signifikan, karena jika aset tersebut dijual ataupun dihapus maka nilai perusahaan juga akan jatuh yang disebabkan oleh nilainya yang tinggi. Oleh sebab itu, pengelolaan aset tetap menjadi faktor utama dalam mencapai kesuksesan entitas, terlebih didalam pemerintahan indonesia.

Dalam menjalani proses bisnis di pemerintahan, tentunya harus didukung dengan administrasi dan pengelolaan yang baik atas aset tetap. Pengelolaan yang baik akan berdampak pada besarnya aset tetap yang akan dihasilkan pada laporan keuangan nantinya. Maka tak heran jumlah aset tetap yang dimiliki negara sebesar dua kali lipatnya utang Indonesia. Pelaksana Direktorat Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan Mundhi Saptono, menyatakan bahwa aset Republik Indonesia dapat dikatakan masih aman dibanding dengan kewajibannya. Mundhi merinci, bahwa total aset negara menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 adalah sebesar Rp 11.098,67 triliun, Meningkat dari tahun sebelumnya, Rp 10.460,5 triliun. Sementara utang negara berdasarkan laporan yang sama adalah sebesar Rp 6.626,4 triliun. Utang itu didominasi kewajiban jangka panjang. Nilai kewajiban negara Indonesia masih aman karena jauh lebih rendah dibandingkan aset negara. Bahkan, sejak 2016, jumlah aset meningkat tidak normal akibat revaluasi atau revaluasi aset pemerintah. (Makki, 2021). Tentunya kasus tersebut akan menjadikan aset tetap sebagai hal yang penting bagi pemerintahan Indonesia.

Dibalik pentingnya aset tetap tersebut, nyatanya dalam pengelolaannya kerap kali terjadi hal yang tidak diinginkan, tak terkecuali aset tetap pada instansi di pemerintahan. Pemerintahan Indonesia mengalami pengelolaan aset tetap yang kurang baik, sehingga hal itu secara tidak langsung akan menimbulkan kerugian negara. Dalam identifikasi penyelesaian Barang Milik Negara yang hilang/rusak misalnya, jumlah aset yang hilang/rusak di lingkungan Kementerian Keuangan Aceh adalah sebanyak 4.255 unit dengan nilai Rp.15.669.479.114,00. BMN yang

diproses oleh Kanwil di lingkungan KPKNL dan DJKN Kanwil Aceh sebanyak 1.217 unit atau setara dengan Rp 2.453.213.540,00. Dari jumlah tersebut, 856 unit dihapus berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau setara dengan Rp 1.430.489.805.00. Kendala yang menyebabkan hasil minor adalah banyak Satker yang tidak dapat melengkapi dokumen penetapan penggunaan BMN, atau perkembangan Eselon I yang diajukan Satker tidak jelas. (Hananto, 2013). Hal ini dapat menggambarkan betapa pentingnya untuk mengelola dan menerapkan pengendalian atas aset tersebut. Manajemen dituntut untuk mengelola dan bertanggung jawab atas aset untuk menggunakan, mengatur, pemindahan dan memberikan wewenang untuk penghentian pemakaian aset tetap agar hal-hal yang dapat merugikan entitas dapat dihindari.

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memilih judul “Tinjauan atas Penerapan Sistem Informasi Aset Tetap pada KPPN Langsa” dikarenakan penulis tertarik dengan kasus maupun fakta yang dijelaskan sebelumnya. KPPN merupakan instansi vertikal di bawah naungan Direktorat Jendral Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. KPPN memiliki tugas yang sangat penting, karena bertanggungjawab dalam menjadi wakil BUN (Bendahara Umum Negara) dalam menyalurkan biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk aset tetap dalam pengelolaannya. Kantor Pelayanan Negara (KPPN) dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan departemen Kementerian/Lembaga.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang nantinya dibahas pada karya tulis :

1. Apakah pengelolaan dan manajemen aset tetap di KPPN Langsa sudah berjalan sesuai teori dan aturan yang berlaku?
2. Apakah pengendalian internal aset tetap yang dilakukan KPPN Langsa dapat mencegah atau mengurangi risiko yang ada?
3. Bagaimana penerapan sistem informasi aset tetap yang dilakukan oleh KPPN Langsa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang sekiranya akan menjawab beberapa permasalahan karya tulis ini :

1. Untuk mengetahui kecocokan antara pengelolaan aset tetap dan aturan yang berlaku di KPPN Langsa.
2. Untuk mengetahui pengendalian internal seperti apa yang dilakukan oleh KPPN Langsa dalam mengatasi risiko.
3. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi aset tetap pada KPPN Langsa.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup dalam Karya Tulis Tugas Akhir siklus aset tetap dan hanya akan membahas jika siklus tersebut benar-benar terjadi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Langsa Tahun anggaran 2021. Beberapa hal yang hanya akan dibahas yaitu:

1. Pengadaan aset tetap;

2. Penggunaan aset tetap;
3. Pemanfaatan aset tetap;
4. pengendalian dan pemeliharaan aset tetap;
5. Pemindahtanganan aset tetap;
6. Penghapusan aset tetap.

1.5 Manfaat Penulisan

Beberapa manfaat yang dapat penulis ambil dalam mengkaji karya tulis adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah terkait aset tetap dalam pelaksanaannya serta mempertimbangkan penerapan sistem informasi aset tetap di instansi terkait, serta dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan efektifitas kinerja di instansi terkait.
2. Manfaat untuk ilmu pengetahuan adalah untuk menambah wawasan serta pengetahuan dalam menerapkan sistem informasi aset tetap. Selain itu, penulis berharap temuan ini dapat digunakan di kampus sebagai referensi khususnya untuk pengembangan sistem informasi aset tetap.
3. Sebagai bahan bagi penulis untuk memahami dan mengkaji lebih dalam terkait aset tetap dalam penerapannya di dunia nyata, baik dalam masyarakat maupun dalam dunia kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Di bagian pendahuluan berisi awal mula permasalahan seperti latar belakang, alasan pemilihan pokok bahasan, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian Metode dan Pembahasan mengkaji tentang teori yang akan dijadikan bahan referensi yang tentunya terkait dengan tujuan penulisan dan topik yang akan dibahas, kemudian di bab ini juga akan menggambarkan secara umum KPPN Langsa seperti struktur organisasi, moto, visi dan misi, sejarah, tusi KPPN, serta akan menampilkan data-data dan fakta terkait siklus aset tetap dalam sistem informasi akuntansi di KPPN Langsa.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian Metode dan Pembahasan membahas bagaimana penerapan sistem informasi aset tetap di instansi terkait dan membahas relevansi data-data yang dikumpulkan dengan dengan teori yang digunakan dalam perkuliahan, serta metode yang digunakan dalam merumuskan permasalahan yang ada dalam meninjau teori tersebut dengan fakta dan data yang ada.

BAB IV SIMPULAN

Berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya yang telah ditinjau antara pelaksanaan sistem informasi aset tetap dan teori-teori yang digunakan dalam perkuliahan. Kemudian di bab ini juga akan sedikit berisi saran yang nantinya akan di pakai untuk menunjang kegiatan dalam penerapan sistem informasi aset tetap di KPPN Langsa.